

PENGUATAN KEKUATAN NEGARA KEPULAUAN UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN MARITIM

Hani Kurniawan

Perwira Mahasiswa Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan Ke-61 TA. 2023

Email: firmankurniawanjunior@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v9i12.124>

Abstrak

Kedaulatan maritim menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keutuhan suatu negara. Negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam memperkuat kedaulatan maritimnya karena memiliki banyak pulau-pulau yang tersebar di lautan dan berbatasan dengan banyak negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kekuatan negara kepulauan dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya. Penguatan kekuatan negara kepulauan dalam memperkuat kedaulatan maritim, meliputi pengertian negara kepulauan, tantangan yang dihadapi, kebijakan yang harus diambil, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan. Kerja sama regional dan internasional dalam memperkuat kedaulatan maritim negara kepulauan.

Kata Kunci: Kedaulatan Maritim, Negara Kepulauan, Penguatan Kekuatan

Abstract

Maritime sovereignty is very important in maintaining the integrity of a country. An archipelagic country has its own challenges in strengthening its maritime sovereignty because it has many islands spread across the ocean and borders many countries. Therefore, efforts are needed to strengthen the power of archipelagic states in maintaining their maritime sovereignty. Strengthening the power of archipelagic states in strengthening maritime sovereignty, including the understanding of archipelagic states, challenges faced, policies that must be taken, and efforts that can be made. Regional and international cooperation in strengthening the maritime sovereignty of archipelagic countries.

Keywords: Maritime Sovereignty, Archipelagic State, Power Strengthening

PENDAHULUAN

Negara kepulauan memiliki ciri khas tersendiri karena memiliki banyak pulau yang tersebar di lautan dan berbatasan dengan banyak negara. Oleh karena itu, negara kepulauan harus mampu mempertahankan kedaulatan maritimnya

dengan baik. Kedaulatan maritim menjadi hal yang sangat penting karena sebagian besar wilayah negara kepulauan terletak di laut dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, mempertahankan kedaulatan maritim tidaklah mudah karena terdapat banyak tantangan yang dihadapi.

Tantangan tersebut meliputi masalah wilayah perbatasan, masalah perairan yang disengketakan, masalah keamanan laut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kekuatan negara kepulauan dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya.

Negara kepulauan Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km memosisikan Indonesia sebagai negara dengan perairan terbesar di dunia.

Kedaulatan maritim merupakan hak negara kepulauan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan wilayah perairan yang terletak di sekitar kepulauannya. Konsep kedaulatan maritim menjadi semakin penting bagi Indonesia mengingat luas perairan yang dimiliki serta potensi yang ada di dalamnya. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritim cukup kompleks. Tidak hanya karena wilayah perairan yang luas, namun juga karena adanya tumpang tindih batas laut dengan negara lain. Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya tidak hanya bersifat politik, namun juga terkait dengan keamanan dan pertahanan. Beberapa negara di sekitar Indonesia bahkan memiliki kekuatan militer yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, terutama di bidang angkatan laut. Selain itu, ancaman

terorisme dan kejahatan maritim juga masih menjadi masalah serius di wilayah perairan Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan penguatan kekuatan negara kepulauan untuk memperkuat kedaulatan maritimnya. Dalam konteks ini, penguatan kekuatan negara kepulauan meliputi pengembangan sektor maritim, peningkatan kemampuan angkatan laut, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait. Penguatan kekuatan negara kepulauan juga harus disertai dengan tindakan yang tepat dalam menangani ancaman keamanan dan pertahanan di wilayah perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam bentuk analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan literasi dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan media online lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Negara Kepulauan

Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang tersebar di lautan. Negara kepulauan memiliki ciri khas tersendiri karena terdapat banyak pulau yang tersebar di wilayahnya. Negara kepulauan juga memiliki

karakteristik wilayah yang luas namun tidak homogen, sehingga memerlukan upaya yang lebih dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya. Contoh negara kepulauan di dunia adalah Indonesia, Filipina, dan Jepang.

Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan/atau kepulauan serta wilayah laut yang mengelilingi kepulauannya. Karakteristik utama dari negara kepulauan adalah kekayaan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah di wilayah perairannya.

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan kepulauan, yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia dan memiliki sumber daya alam kelautan yang melimpah.

Karakteristik negara kepulauan memberikan dampak penting pada kebijakan nasional, terutama dalam hal penentuan batas wilayah laut dan pengelolaan sumber daya alam kelautan. Negara kepulauan memiliki hak khusus dalam mengelola wilayah perairannya dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini termasuk hak untuk menentukan batas laut dan hak untuk mengelola sumber daya alam di dalam wilayah lautnya.

Negara kepulauan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan jumlah pulau yang banyak menimbulkan tantangan dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan batas lautnya. Oleh karena itu, penting bagi negara kepulauan untuk melakukan penguatan kekuatan negaranya dalam menghadapi tantangan yang ada di wilayah perairannya.

Penguatan kekuatan negara kepulauan meliputi berbagai aspek, seperti pengembangan sektor maritim, peningkatan kemampuan angkatan laut, dan peningkatan sarana dan prasarana. Penguatan kekuatan negara kepulauan juga harus disertai dengan tindakan yang tepat dalam menangani ancaman keamanan dan pertahanan di wilayah perairan. Dengan melakukan penguatan kekuatan negara kepulauan, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan maritimnya dan mengembangkan sektor maritim sebagai sumber pendapatan nasional yang lebih besar.

B. Tantangan yang Dihadapi

Negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam memperkuat kedaulatan maritimnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola wilayah perairannya dan menjaga

keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia di wilayah perairannya antara lain adalah:

1. Masalah wilayah perbatasan Negara kepulauan memiliki banyak pulau yang tersebar di lautan dan berbatasan dengan banyak negara. Hal ini menyebabkan adanya masalah wilayah perbatasan yang kompleks. Negara kepulauan harus mampu menetapkan batas wilayahnya dengan jelas dan mempertahankan wilayahnya dari tuntutan negara lain yang merasa memiliki hak atas wilayah yang disengketakan.

2. Illegal Fishing: Wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan yang melimpah. Namun, banyak kapal asing yang melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dapat merusak ekosistem laut dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara.

3. Ancaman Teroris dan Kejahatan Laut: Indonesia juga menghadapi ancaman dari teroris dan kejahatan laut seperti perompakan dan pencurian kapal. Ancaman ini dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.

4. Bencana Alam: Wilayah perairan Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan badai tropis. Bencana alam ini dapat

mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah perairan dan mengancam keselamatan manusia.

5. Penangkapan Ikan Berlebihan: Selain illegal fishing, Indonesia juga menghadapi permasalahan terkait penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan lokal. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menyebabkan menurunnya populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia perlu melakukan penguatan kekuatan negara kepulauan. Penguatan kekuatan ini meliputi berbagai aspek seperti pengembangan sektor maritim, peningkatan kemampuan angkatan laut, dan peningkatan sarana dan prasarana. Penguatan kekuatan negara kepulauan juga harus disertai dengan tindakan yang tepat dalam menangani ancaman keamanan dan pertahanan di wilayah perairan.

C. Kebijakan yang Harus diambil

Untuk memperkuat kekuatan negara kepulauan dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya, perlu diambil beberapa kebijakan, antara lain:

1. Meningkatkan Kemampuan Militer di Wilayah Laut Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan militer di wilayah laut, seperti memperkuat armada laut, pesawat tempur, dan kapal selam. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan

keterampilan personil militer dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan keamanan dan kedaulatan di wilayah laut.

2. Meningkatkan Kerja Sama Pertahanan Pemerintah perlu menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah laut. Kerja sama pertahanan dapat meliputi pelatihan personil, pertukaran informasi intelijen, dan peningkatan kemampuan militer bersama.

3. Mengembangkan Infrastruktur Pertahanan Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur pertahanan di wilayah laut seperti pangkalan militer, bandara militer, dan pos pengawasan. Infrastruktur pertahanan ini dapat digunakan untuk mendukung operasi militer di wilayah laut dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

4. Menegakkan Hukum Laut Internasional Negara kepulauan perlu menegakkan hukum laut internasional di wilayah lautnya, seperti UNCLOS 1982, dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah laut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan laut dan menegakkan hukum laut terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut.

5. Meningkatkan Kerja Sama Internasional Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang pertahanan, seperti kerja

sama dalam pelatihan personil, penjualan senjata, dan teknologi pertahanan. Kerja sama internasional dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan memperkuat kedaulatan di wilayah laut.

Namun, penting juga diingat bahwa penggunaan kekuatan militer harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, pemerintah juga harus mengutamakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah laut agar tercipta kondisi yang stabil dan damai di wilayah laut.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pada kebijakan ini, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor maritim, seperti menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan, membuka peluang kerja di sektor maritim, serta mendukung program-program yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan di wilayah maritim. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor maritim sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pengembangan sektor maritim.

2. Meningkatkan Kerja Sama Internasional Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang maritim dapat dilakukan dengan cara memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, pertukaran informasi dan teknologi, serta

kerja sama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat memperkuat kapasitas negara kepulauan dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan wilayah laut.

3. Mengembangkan Infrastruktur Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam pengembangan sektor maritim. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur yang ada di wilayah maritim seperti pelabuhan, jalan raya, dan infrastruktur pendukung lainnya. Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor maritim sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah maritim.

4. Meningkatkan Penegakan Hukum Laut Penegakan hukum laut dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga penegak hukum laut, meningkatkan kapasitas personil, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat memperkuat sistem hukum di wilayah laut sehingga dapat mengurangi tindakan kejahatan di laut dan meningkatkan kedaulatan negara di wilayah laut.

5. Memperkuat Konsistensi Kebijakan Konsistensi kebijakan sangat penting dalam pengembangan sektor maritim. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil dalam pengembangan sektor maritim tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan visi

dan misi negara kepulauan dalam pengembangan sektor maritim.

6. Mendukung Inovasi Teknologi Inovasi teknologi dapat menjadi kunci dalam pengembangan sektor maritim. Pemerintah dapat mendukung inovasi teknologi di sektor maritim, seperti teknologi pengawasan dan navigasi, sistem komunikasi, serta teknologi energi terbarukan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wilayah maritim.

7. Menjaga Keseimbangan Antara Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi di sektor maritim harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah maritim seperti melindungi terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut, memperbaiki kualitas air, serta mengurangi pencemaran laut. Hal ini dapat meningkatkan daya dukung lingkungan di wilayah maritim dan menjaga ketersediaan sumber daya alam di masa depan.

8. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan sektor maritim. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah maritim seperti melalui pengembangan

komunitas nelayan yang berkelanjutan, penyediaan akses informasi yang mudah, serta memberikan kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah maritim. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan wilayah maritim serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut.

9. Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah maritim. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis sektor maritim. Dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di wilayah maritim.

Dalam menghadapi tantangan dalam penguatan kekuatan negara kepulauan untuk memperkuat kedaulatan maritim, diperlukan kebijakan-kebijakan yang holistik dan komprehensif. Dengan memperkuat sumber daya manusia, kerja sama internasional, infrastruktur, penegakan hukum laut, konsistensi kebijakan, inovasi teknologi, menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan

ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas negara kepulauan dalam pengembangan sektor maritim dan memperkuat kedaulatan negara di wilayah laut.

Jika kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya digabungkan, maka akan tercipta suatu strategi yang komprehensif dalam memperkuat kedaulatan maritim negara kepulauan. Gabungan kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penguatan kekuatan negara kepulauan di berbagai aspek, seperti diplomasi, ekonomi, hukum, dan militer.

Secara lebih rinci, misalnya kebijakan peningkatan kemampuan militer di wilayah laut dapat diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur pertahanan, sehingga pangkalan militer dan pos pengawasan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan lokasi strategis dan kebutuhan pertahanan di wilayah laut. Sementara itu, kebijakan menegakkan hukum laut internasional dapat disatukan dengan kerja sama pertahanan dan diplomasi, sehingga negara kepulauan dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa wilayah laut dengan negara-negara tetangga.

Selain itu, strategi ini juga dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah laut, seperti dengan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan laut. Selain memberikan keuntungan untuk keamanan dan kedaulatan negara, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat rasa kepemilikan dan kesadaran akan pentingnya menjaga wilayah laut negara.

Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa penggunaan kebijakan-kebijakan ini harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Terlebih lagi, perlu ditekankan bahwa keberhasilan penguatan kekuatan negara kepulauan dalam memperkuat kedaulatan maritim tidak hanya bergantung pada penguatan kekuatan militer semata, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan personel yang terkait dengan keamanan dan kedaulatan di wilayah laut.

D. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan

Untuk memperkuat kekuatan negara kepulauan dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan di wilayah perairan. Negara kepulauan harus mampu meningkatkan pengawasan di wilayah perairannya untuk mempertahankan

kedaulatan maritimnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas personel yang bertugas di wilayah perairan, memperkuat teknologi pengawasan seperti penggunaan satelit, dan memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga penegak hukum. Dengan memperkuat kehadiran kapal patroli dan pengawasan udara di wilayah perairan, serta meningkatkan penggunaan teknologi canggih seperti radar dan satelit untuk memantau aktivitas di laut.

2. Memperkuat kemampuan dalam hal penegakan hukum di laut. Negara kepulauan harus mampu memperkuat kemampuan dalam hal penegakan hukum di laut untuk mempertahankan kedaulatan maritimnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan personel yang bertugas di wilayah perairan, memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam hal penindakan pelanggaran hukum di laut, dan memperkuat peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah perairan.

3. Mengembangkan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Negara kepulauan harus mampu mengembangkan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan maritimnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas

eksploitasi sumber daya alam di laut, dan memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kapasitas Angkatan Laut: Selain meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah perairan, penguatan kekuatan negara kepulauan juga harus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas angkatan laut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat perlengkapan dan persenjataan, meningkatkan kemampuan operasional, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas personel angkatan laut.

5. Meningkatkan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum: Peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kebijakan dan regulasi yang berkelanjutan serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik ilegal dan tidak bertanggung jawab.

6. Meningkatkan Pengembangan Industri Pertahanan dan Kelautan: Penguatan kekuatan negara kepulauan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pengembangan industri pertahanan dan kelautan. Hal ini meliputi pengembangan teknologi canggih dalam bidang pertahanan dan pengembangan industri kelautan yang ramah lingkungan serta mengoptimalkan potensi wilayah perairan.

7. Meningkatkan Kerjasama Internasional: Peningkatan kerjasama internasional juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Hal ini meliputi kerjasama dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya kelautan, dan pembangunan kawasan maritim dengan negara-negara lain.

8. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Upaya terakhir yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengawasan dan patroli di wilayah perairan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, peningkatan kualifikasi, serta penghargaan dan insentif yang memadai.

Dalam melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan negara kepulauan Indonesia dapat memperkuat kekuatannya dalam memperkuat kedaulatan maritim.

PENUTUP

Kedaulatan maritim menjadi hal yang sangat penting bagi negara kepulauan. Negara kepulauan harus mampu memperkuat kekuatannya dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya dengan mengambil beberapa kebijakan seperti membangun kekuatan militer dan keamanan laut yang handal, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di laut, dan meningkatkan kerja sama regional dan

internasional. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kekuatan negara kepulauan dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya seperti meningkatkan pengawasan di wilayah perairan, memperkuat kemampuan dalam hal penegakan hukum di laut, dan mengembangkan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Kekuatan negara kepulauan yang kuat dan efektif dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan akan membawa manfaat ekonomi, sosial, dan politik bagi negara dan masyarakatnya. Selain itu, memperkuat kedaulatan maritim juga akan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat regional dan internasional, sehingga dapat lebih aktif dalam mengambil peran dalam isu-isu kelautan dan perikanan global.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2018). Indonesia to intensify maritime patrol to secure sovereignty. Retrieved from <https://en.antaranews.com/news/114464/indonesia-to-intensify-maritime-patrol-to-secure-sovereignty>

Djakapermana, R. D. (2019). Pertahanan keamanan maritim Indonesia: antara kepentingan nasional dan kerja sama

internasional. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 99-120.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019). Buku putih pertahanan Indonesia 2019. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan 2020-2024. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Konstitusi Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf